

Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Wonogiri

Retno Widyowati, Is Hadri Utomo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret
e-mail: retnowidyowati021@student.uns.ac.id

Abstrak

Stunting pada anak merupakan kondisi gagal tumbuh akibat malnutrisi kronis yang dampak buruknya dapat berlangsung hingga jangka panjang karena proses kognitif yang tidak optimal, akan mengalami kesulitan belajar, dan tidak produktif sehingga berpenghasilan rendah saat dewasa. Percepatan penurunan *stunting* menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan mengedepankan kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya teknik analisis menggunakan model Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan triangulasi metode melalui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan sejumlah pemangku kepentingan yakni perangkat daerah, termasuk TP PKK dalam tim percepatan penurunan *stunting*, serta masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri sesuai dengan teori kolaborasi oleh Ansell & Gash (2007) dengan adanya proses yang dilakukan terdiri dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil.

Kata Kunci: kolaborasi pemerintah, Kabupaten Wonogiri, *stunting*

Abstract

Stunting in children is a condition of growth failure due to chronic malnutrition whose adverse effects can last for a long time because the cognitive process is not optimal, will experience learning difficulties, and is not productive so that low income as an adult. Accelerating the reduction of stunting is a commitment of the Wonogiri Regency Government by prioritizing collaboration. This study aims to determine collaborative governance in accelerating stunting reduction in Wonogiri Regency, using descriptive qualitative research methods. Data collection was conducted through interviews and documentation, then the analysis technique used the Miles & Huberman (1994) model consisting of reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validation was carried out by triangulating methods through interviews and documentation methods. The results of research conducted with a number of stakeholders, namely regional apparatus, including TP PKK in the stunting reduction acceleration team, and the community, show that collaboration in accelerating stunting reduction in Wonogiri District is in accordance with the collaboration theory by Ansell & Gash (2007) with the process carried out consisting of face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes.

Keywords: collaborative governance, Wonogiri Regency, *stunting*

Pendahuluan

Stunting adalah permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah. *Stunting* merupakan akibat dari gizi buruk atau malnutrisi kronis sejak dalam kandungan dan usia dini. Anak yang *stunting* mengalami kondisi gagal tumbuh dan otak tidak dapat mengembangkan proses kognitif sepenuhnya, sehingga akan mengalami kesulitan belajar, berpenghasilan lebih rendah saat dewasa, dan sulit berpartisipasi di masyarakat (UNICEF *et al.*, 2023). Oleh karena itu, komitmen untuk mengatasi *stunting* menjadi hal penting bagi pemerintah yang juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) poin ke-2 untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

Pada tahun 2018 *stunting* menyerang 7,3 juta anak balita di Indonesia dengan prevalensi 31 persen (Bappenas & UNICEF, 2019). Selanjutnya berdasarkan SSGBI tahun 2019, prevalensi *stunting* di Indonesia berada di angka 27,7 persen yang berarti ada sekitar 6.538.564 anak mengalami *stunting* (Chaterine dalam Kompas.com, 2021). Kemudian dari data SSGI tahun 2021 diketahui bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia adalah 24,4 persen (Kemenkes RI, 2021), artinya sudah ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan kembali terlihat dalam hasil SSGI tahun 2022, yaitu menjadi 21,6 persen (Kemenkes RI, 2023). Meski demikian, Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi *stunting* di tahun 2024 turun menjadi 14 persen, sehingga upaya yang lebih intensif diperlukan untuk dapat mencapai target.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan target 14 persen pada tahun 2024 di tingkat nasional harus dicapai. Semua pihak diminta bersungguh-sungguh melaksanakan program yang menjadi tanggung jawab bersama dengan berkolaborasi, mengupayakan terobosan, serta menjadikan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia sebagai acuan (kominfo.go.id, 2022). Kolaborasi menjadi kunci dalam percepatan penurunan *stunting* karena penyebab *stunting* yang multifaktor. Menurut UNICEF Framework terdapat 3 (tiga) faktor utama penyebab *stunting*, yaitu asupan makanan yang tidak seimbang, berat badan lahir rendah, dan riwayat penyakit (*The Journal* dalam Fitri, 2018). Sedangkan faktor lain berkaitan dengan kurang memadainya pengetahuan pola asuh, kondisi sosial ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain.

Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu daerah yang mengedepankan kolaborasi dalam percepatan penurunan *stunting*. Kabupaten Wonogiri menarik untuk dipilih menjadi lokasi dari penelitian ini karena dinilai sebagai model yang baik dalam penurunan *stunting*. Hal itu seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang berkunjung bersama Kepala Pusat BKKBN dr Hasto Wardoyo untuk mengetahui bagaimana penanganan *stunting* di Kabupaten

Wonogiri (krjogja.com, 2022). Selain itu dr Hasto mengatakan bahwa Wonogiri menjadi contoh praktik yang baik karena *stunting*nya rendah di Jawa Tengah, jadi menarik untuk belajar seperti apa yang dilakukan di Wonogiri selain sosialisasi (jateng.tribunnews.com, 2022).

Pergerakan prevalensi *stunting* di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat misalnya melalui e-PPGBM yang menunjukkan data *real time* dari penginputan oleh petugas gizi Puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulan. Pergerakan prevalensi berdasarkan perhitungan data sementara hasil penimbangan serentak pada bulan Februari dan Agustus di Kabupaten Wonogiri dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. Data balita (0-59 bulan) *stunted* di Kabupaten Wonogiri

Tahun	Banyaknya balita yang diukur panjang/TB	Banyaknya balita <i>stunted</i>	Prevalensi <i>stunted</i> (%)
2019 (Februari)	44.661	3.589	8,03
2019 (Agustus)	44.199	4.522	10,23
2020 (Februari)	26.779	3.073	11,47
2020 (Agustus)	38.910	5.114	13,14
2021 (Februari)	37.105	5.222	14,07
2021 (Agustus)	38.268	4.917	12,84
2022 (Februari)	39.012	4.732	12,12
2022 (Agustus)	43.637	4.627	10,60
2023 (Februari)	44.936	4.513	10,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat penurunan prevalensi balita yang dikhawatirkan berpotensi *stunting* di Kabupaten Wonogiri secara berturut-turut menjadi 12,84 persen, 12,12 persen, 10,60 persen, dan kemudian 10,04 persen dengan semakin banyak jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badannya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus mengupayakan kolaborasi untuk mewujudkan percepatan penurunan *stunting*. Penelitian ini meneliti tentang tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri yang diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam percepatan penurunan *stunting* dan memberikan masukan bagi tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif banyak digunakan di bidang sosial dimana hasil penelitian diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian dianalisis dan diinterpretasi (Anggito & Setiawan dalam Arianita *et al*, 2021). Pendekatan deskriptif adalah untuk mendeskripsikan

yang dilihat, didengar, dirasakan, ataupun ditanyakan (Sugiono dalam Arianita *et al*, 2021) sehingga sesuai untuk mendeskripsikan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri secara lebih mendalam menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2007) berfokus pada proses kolaborasi, terdiri dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu non random dimana peneliti menentukan identitas khusus sesuai dengan tujuan penelitian untuk dapat menanggapi kasus penelitian (Lenaini, 2021). Informan yang dipilih adalah dari sektor pemerintah dan non pemerintah yang paham dan terlibat dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri, yakni dari Bappeda dan Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas PPKB dan P3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta TP PKK, dan Masyarakat Kabupaten Wonogiri. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi metode dengan mengumpulkan data melalui metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* bahwa di tingkat kabupaten/kota, Bupati/Wali Kota menetapkan TPPS tingkat kabupaten/kota untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan yang terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP PKK). TPPS di tingkat Kabupaten Wonogiri ditetapkan melalui SK Bupati Wonogiri No 441.7/200/HK/2022 tentang Pembentukan TPPS, dengan susunan tim terdiri dari Bupati Wonogiri selaku ketua pengarah, diikuti oleh anggota pengarah, ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, dan berbagai personil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sekretariat pelaksana; bidang pelayanan intervensi sensitif dan spesifik; bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga; bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan; dan bidang data, monitoring, evaluasi, dan *knowledge management* dengan melibatkan sektor swasta atau badan usaha untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri.

Percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri didorong dengan pelaksanaan aksi konvergensi *stunting* untuk menyelaraskan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk pencegahan *stunting* kepada sasaran prioritas (stunting.go.id, 2020). Sasaran yang menjadi prioritas dalam upaya percepatan penurunan *stunting* adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan. Adapun sasaran penting lainnya yakni remaja dan wanita usia subur serta anak usia 24-59 bulan. Terhadap sasaran-sasaran tersebut dilakukan intervensi berupa intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, sehingga membutuhkan kolaborasi yang di dalamnya dilakukan suatu proses untuk mewujudkan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri.

Proses Kolaborasi

a. *Face-to-face dialogue* (dialog tatap muka)

Kolaborasi penting dibangun dengan adanya dialog tatap muka antar *stakeholder* untuk dapat melakukan dialog secara langsung dan mencegah adanya hambatan dalam komunikasi. Dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri, dialog tatap muka telah dilakukan mulai dari tim kecil (OPD), tim besar (TPPS), hingga dalam skala yang lebih luas melibatkan instansi vertikal yaitu berupa rembuk *stunting*. Dialog tatap muka antar *stakeholder* sebenarnya dapat dilakukan tanpa dibatasi dalam kurun waktu tertentu, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 1. Rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan *stunting*



Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Wonogiri (discan pribadi)

Untuk tatap muka dalam tim besar yaitu TPPS di tingkat Kabupaten Wonogiri biasanya berupa pertemuan atau rapat rutin dalam jangka waktu tri wulan atau minimal tiap semester dalam satu tahun atau juga sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dialog tatap muka tersebut melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk dari OPD-OPD yang menjadi bagian dalam TPPS.

Gambar 2. Rapat forum lintas OPD dengan tema percepatan penurunan *stunting*



Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Wonogiri (*discan* pribadi)

Namun, dalam kolaborasi ini diketahui belum ada keterlibatan aktif dari sektor swasta atau badan usaha yang notabene turut menjadi bagian dari TPPS Kabupaten Wonogiri. Saat ini penyelenggaraan dialog tatap muka secara menyeluruh melibatkan sektor swasta atau badan usaha dalam TPPS Kabupaten Wonogiri masih dalam tahap perencanaan untuk segera dilakukan. Di sisi lain, TPPS di tingkat kecamatan dan desa diketahui telah melaksanakan adanya dialog tatap muka.

Gambar 3. Sosialisasi penanggulangan stunting kepada TPPS desa/kelurahan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Wonogiri (*discan* pribadi)

Dialog tatap muka yang dilaksanakan pada praktiknya memberikan kesempatan kepada setiap *stakeholder* untuk aktif berdiskusi menyampaikan pemikiran terkait segala sesuatu dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, contohnya adalah untuk membahas terkait aksi konvergensi untuk upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri.

Gambar 4. Rapat koordinasi review aksi konvergensi *stunting* Kab. Wonogiri



Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Wonogiri (*discan* pribadi)

Selain itu, tujuan pembahasan dalam dialog tatap muka juga disesuaikan dengan tema yang memang perlu dibahas yakni kaitannya dengan percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan data dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri, dialog tatap muka yang dilakukan dapat berupa rapat koordinasi dengan tujuan antara lain:

1. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan aksi konvergensi penanggulangan *stunting*
2. Rapat koordinasi penguatan program penanggulangan masalah gizi melalui dukungan 8 (delapan) aksi pencegahan *stunting*
3. Rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan OPD dalam mendukung aksi konvergensi penanggulangan *stunting* sesuai Permendagri 90
4. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan rembuk *stunting* Kabupaten Wonogiri
5. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penilaian kinerja aksi konvergensi *stunting*
6. Rapat koordinasi pembahasan draf regulasi petunjuk pelaksanaan gerakan bumilimase di Kabupaten Wonogiri

Dialog tatap muka juga dilakukan dalam skala yang lebih luas, yaitu berupa rembuk *stunting* yang dilaksanakan setiap tahun secara rutin dan berkesinambungan dimana hasil dari rembuk *stunting* akan dijadikan sebagai dasar bagi pelaksanaan rembuk *stunting* berikutnya. Rembuk *stunting* dijadwalkan minimal dua kali setahun, yaitu rembuk *stunting* di tingkat kabupaten satu kali, dan di tingkat kecamatan dan desa setidaknya satu kali. Data Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa rembuk *stunting* di tingkat Kabupaten Wonogiri biasanya dilaksanakan dengan metode kombinasi luring di Pendopo Kabupaten Wonogiri dan Pendopo Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri, serta semi luring dan daring melalui *zoom meeting*, *youtube*, dan siaran langsung di Radio Giri Swara Wonogiri. Peserta rembuk *stunting* diantaranya berasal dari:

1. Forkopimda Kab. Wonogiri
2. Forkopimcam, Forkopimdes dan Kelurahan se Kab. Wonogiri
3. Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah
4. *Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction* (LGCB-ASR) Kemendagri
5. Perwakilan instansi vertikal (BPS, Kemenag, BPJS)
6. Direktur rumah sakit dan rumah bersalin swasta dan pemerintah se Kab. Wonogiri
7. Kepala Puskesmas se Kab. Wonogiri
8. Lembaga non pemerintah (NGO, Asosiasi profesi) dan perguruan tinggi (Stikes/Akbid/Akper/Universitas) terkait penanggulangan *stunting*
9. TP PKK Kabupaten

10. Perwakilan pemuda, karang taruna, dan organisasi kepemudaan (seperti IMAPRES, OSIS, dan lain-lain).

Luaran dari pelaksanaan *rembuk stunting* diantaranya berupa:

1. Komitmen penurunan *stunting* yang ditandatangani oleh Bupati, Ketua DPRD, Ketua TPPS, Kepala Kantor Kemenag, dan perwakilan Tim Pendamping Keluarga
2. Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan *stunting* yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dilaksanakan pada tahun berjalan dan untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya

Gambar 5. *Rembuk stunting* di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2022



Sumber: Bappeda dan Litbang
Kab. Wonogiri (discan pribadi)

Tahun 2023



Sumber: youtube rgs wonogiri

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyadari bahwa keterlibatan *stakeholder* mulai dari instansi vertical hingga masyarakat adalah hal penting yang wajib diakomodir. Untuk itu, dialog tatap muka dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* diwujudkan sampai kepada lapisan masyarakat, contohnya yaitu dengan sosialisasi terkait penanggulangan masalah gizi bagi kepala desa/lurah, KPM, bidan desa, Ketua TP PKK dan posyandu secara interaktif untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mengaku diperhatikan suara dan kebutuhan mereka.

b. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan menjadi hal penting yang harus dibangun untuk mencegah munculnya persepsi negatif yang dapat menghambat kolaborasi. Dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri, Bupati Wonogiri dan jajarannya menunjukkan peran penting dalam merangkul *stakeholder* untuk percaya dan mau terlibat dalam kolaborasi. Bapak Bupati memiliki posisi yang strategis untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* adalah untuk perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri dengan berbagai intervensi yang telah disesuaikan. Di samping itu, Bapak Wakil Bupati turut menunjukkan perannya dalam mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kolaborasi percepatan

penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* Kabupaten Wonogiri. Pendekatan yang dilakukan sebagai upaya untuk merangkul dan menumbuhkan kepercayaan dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* disesuaikan dengan tiap-tiap sasaran, yaitu formal dengan perangkat daerah, dan lebih luwes dengan masyarakat.

Di samping itu, kepercayaan dalam kolaborasi dapat terbentuk sejak awal karena sudah adanya kesadaran dari dalam diri *stakeholder* bahwa mengatasi *stunting* tidak bisa dilakukan oleh satu *stakeholder* saja, sehingga mereka percaya untuk mewujudkan percepatan penurunan *stunting* dengan bekerja sama. *Stakeholder* telah memiliki kesadaran yang baik, sehingga dengan mudah dirangkul untuk berkolaborasi dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri. Kepercayaan di antara *stakeholder* dalam kolaborasi ini juga terbangun karena adanya pembagian tanggung jawab yang jelas. Pembagian tanggung jawab disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga *stakeholder* yakin bahwa masing-masing dari mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dan komitmen untuk mewujudkan percepatan penurunan *stunting* dengan kapasitas yang mereka miliki. Untuk melanggengkan kepercayaan dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri dilakukan pertemuan dan komunikasi intens untuk mendorong keterbukaan antar*stakeholder*. Komunikasi dianggap penting untuk menyinkronkan program dan kegiatan, tidak hanya dengan OPD tetapi juga dengan masyarakat sehingga masyarakat mengaku percaya kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk bisa mensukseskan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri.

c. *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses)

Kolaborasi tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen yang diwujudkan. Dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri, komitmen *stakeholder* diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan intervensi yang dilakukan, baik spesifik maupun sensitif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing namun saling berkaitan untuk dapat bersama-sama “mengeroyok” faktor penyebab *stunting*. Dari data Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri, berikut ini diketahui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan *stunting*:

a. Dinas Kesehatan:

1. Penyuluhan tentang dampak *stunting* di masyarakat, melalui forum posyandu dan davis (dasa wisma)
2. Pelaksanaan penanggulangan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dengan sasaran 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) antara lain dengan:
3. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis
4. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat

5. Mengatasi kekurangan iodium
6. Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum)
7. Mendorong pemberian ASI eksklusif
8. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil
9. Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI
10. Menyediakan obat cacing
11. Menyediakan suplementasi zink
12. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan
13. Memberikan imunisasi lengkap
14. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare
15. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik
16. Pelaksanaan penimbangan balita serentak dan penyediaan data pengukuran balita *stunting*
17. Penyebarluasan informasi *stunting* melalui berbagai media promosi kesehatan
18. Peningkatan pelayanan akses Jaminan Kesehatan (JKN)
19. Pemantauan garam konsumsi di masyarakat dan di sekolah. Baik dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan iodina test, maupun dengan metode kualitatif yaitu dengan metode titrasi
20. Pengadaan alat iodina test dan reagen
21. Palpasi gondok pada anak SD dan ibu hamil melalui UKS
22. Pemeriksaan NHI pada neonatal dengan menggunakan kuesioner
23. Pemeriksaan SHK (*Skrining Hipotiroid Kongenital*) pada bayi baru lahir di Wonogiri
24. Pengiriman sampel untuk pemeriksaan SHK ke RS Hasan Sadikin Bandung
25. Melaksanakan penanganan gondok dengan metode operasi gondok di RSUD dr. Soediran Mangoen Soemarso

Selain itu, Dinas Kesehatan telah menginisiasi pembentukan aplikasi CMK (Cinta Mutiara Keluarga) berbasis web dan android untuk mempermudah pengumpulan data sebagai upaya penanggulangan masalah tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) pada masa kehamilan ataupun saat melahirkan, kemudian aplikasi tersebut dikembangkan sehingga sasarannya menjadi lebih luas yaitu pada bayi dan balita sebagai salah satu upaya penanggulangan *stunting*. Data pada aplikasi tersebut adalah data terkait ibu hamil, hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan bayi dan balita setiap bulan yang diinput oleh bidan seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri. Data yang telah dianalisis oleh tim IT Dinas Kesehatan tersebut

dapat dimanfaatkan oleh Kepala Daerah, OPD terkait, petugas kesehatan di desa, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit sesuai kebutuhan untuk dapat merumuskan kebijakan untuk menangani masyarakat terindikasi *stunting*.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD):

1. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk kesehatan dan pencegahan *stunting*
2. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan
3. Mendorong memberikan advokasi kepada desa untuk mengalokasi dana desa untuk kegiatan kesehatan ibu, bayi, dan pencegahan *stunting*
4. Meningkatkan kapasitas bagi pemerintah desa, kelembagaan desa, masyarakat, kader kesehatan desa dan KPM untuk mampu melakukan penurunan kematian ibu, bayi dan *stunting* dan tata laksanaanya
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kelompok perempuan, anak dan warga berkebutuhan khusus (difabel, *stunting*, dan lain-lain) melalui penyelenggaraan musyawarah khusus
6. Melakukan pendampingan usulan kegiatan desa (bidang kesehatan) agar dapat masuk pada RKPDesa dan APBDes
7. Melaksanakan advokasi kegiatan penanggulangan GAKI di desa melalui penggunaan dana desa di bidang kesehatan pada para perangkat desa, mulai dari perencanaan, implementasi dan kegiatan monev

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak melalui bantuan operasional bagi PAUD untuk penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak, dan penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja
2. Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat
3. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
4. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan
5. Penetapan kurikulum muatan lokal dengan memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi

c. Dinas Pekerjaan Umum:

Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, baik melalui anggaran APBD, bantuan provinsi ataupun DAK air bersih dan Pamsimas guna mendukung pencegahan dan penanggulangan *stunting*

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana perumahan bagi warga miskin melalui rehab RTLH dan jamban, baik melalui anggaran APBD, bantuan provinsi ataupun dari bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat guna mendukung pencegahan dan penanggulangan *stunting*

e. Dinas PPKB dan P3A

1. Peningkatan akses pelayanan KB (Keluarga Berencana)
2. Penyediaan konseling pengasuhan bagi orang tua
3. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Peningkatan promosi pengasuhan 1.000 HPK
5. Sosialisasi gizi seimbang, ASI, pembatasan GGL, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga
6. Pemasangan baliho sosialisasi pencegahan *stunting*
7. Berperan dalam pencegahan pernikahan usia minimal nikah sehingga mencegah kenaikan angka kelahiran di daerah melalui kegiatan GenRe dan Kampung KB, BKB, dan BKR di Kabupaten Wonogiri

Dinas PPKB dan P3A mulai tahun 2022 juga menjadi sekretariat TPPS Kabupaten Wonogiri yang mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan *stunting* di tingkat Kabupaten Wonogiri

f. Dinas Sosial:

1. Memfasilitasi akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH)
2. Memfasilitasi akses BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk keluarga kurang mampu
3. Melakukan sosialisasi kesehatan dan penanggulangan *stunting* melalui FDS (*Family Development Session*) pada anggota PKH

g. Dinas Pertanian dan Pangan

Menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang telah diimplementasikan di sejumlah kabupaten/kota prioritas. Sumber pendanaan untuk program KRPL berasal dari APBN, APBD, DAK, dan sumber pendanaan lain yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

h. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Melaksanakan promosi pemasaran dan promosi hasil peternakan, kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kualitas gizi masyarakat

i. Tim Penggerak PKK (TP PKK)

Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penanggulangan dampak *stunting* dan kekurangan iodium. Dengan prakarsa Ketua TP PKK Kabupaten Wonogiri telah dibentuk Gerakan Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat (Bumilimase) sebagai gerakan

swadaya berbasis desa untuk upaya pencegahan *stunting* dengan meningkatkan status gizi ibu hamil kekurangan energi kronis dan anak balita gizi kurang dari keluarga tidak mampu atau memiliki kerawanan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Gerakan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan ketahanan fisik serta tumbuh kembang sehingga menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif

Selain itu, bersama Dinas PPKB dan P3A, PKK melakukan upaya pencegahan pernikahan di bawah usia minimal menikah yaitu dengan sosialisasi dan aktifitas lembaga Bina Keluarga Balita, serta dengan sosialisasi melalui Radio Giri Swara dalam acara Bincang Keluarga. Forum yang dimanfaatkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *stunting* adalah forum PKK, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa bahkan sampai dengan dasa wisma dengan melalui fasilitasi penyelenggaraan posyandu dan penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita

j. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan

1. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan
2. Pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan, dan
3. Selalu aktif dalam setiap kegiatan pengawasan peredaran garam konsumsi, melakukan sosialisasi di pasar-pasar tentang cara distribusi dan penyimpanan garam di kios pasar dan melakukan pengawasan bersama LP POM Surakarta

k. Kantor Kementerian Agama

Melakukan sosialisasi pencegahan *stunting* melalui bimbingan perkawinan - pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah

Gambar 6. Pembinaan perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka penanggulangan *stunting* kerja sama Kantor Kemenag dan Dinas Kesehatan Kab.

Wonogiri



Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Wonogiri (discan pribadi)

Pada tahun 2022 jumlah program penanggulangan *stunting* yang dibiayai dari APBD Kabupaten Wonogiri sebanyak 22 program, terdiri dari 28 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang menjadi urusan 12 OPD di Kabupaten Wonogiri dengan jumlah anggaran Rp 84.335.693.827 terdiri dari penanggulangan gizi spesifik sebesar Rp 23.745.792.598,- dan penanggulangan gizi sensitif sebesar Rp 60.589.901.229,-. Sedangkan untuk tahun 2023 usulan rencana jumlah program penanggulangan *stunting* yang dibiayai dari APBD Kabupaten Wonogiri sebanyak 22 program terdiri dari 28 kegiatan yang menjadi urusan 19 OPD di Kabupaten Wonogiri dengan jumlah anggaran Rp 51.979.954.125 terdiri dari penanggulangan gizi spesifik sebesar Rp 30.526.783.837,- dan penanggulangan gizi sensitif sebesar Rp 21.453.170.288,-. Adapun program penanggulangan *stunting* yang dibiayai melalui APBDesa tahun 2022 se-Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 23.973.716.300,- terdiri dari 10 jenis kegiatan yang dilaksanakan masing-masing pemerintah desa. Sedangkan program penanggulangan *stunting* yang dibiayai dari anggaran DAK tahun 2022 yang terkait dengan penanggulangan *stunting* sebesar Rp 57.841.041.360 terdiri atas DAK Fisik dengan anggaran Rp 41.251.033.000 dan DAK non Fisik penugasan dengan anggaran Rp 16.590.008.360

Berbagai program dan kegiatan penanggulangan *stunting* dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan percepatan penurunan *stunting*. Upaya menjaga komitmen dalam keberjalanan kolaborasi difasilitasi melalui pertemuan atau rapat rutin dan didukung dengan adanya apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang hal itu dapat menjadi motivasi tersendiri bagi *stakeholder*. *Reward* diberikan antara lain kepada desa, puskesmas, petugas gizi dan kecamatan yang berhasil mendukung percepatan penurunan jumlah *stunting*. Meski demikian, komitmen yang diwujudkan tidak hanya ditujukan untuk sekadar mencapai angka penurunan *stunting*, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi *stunting* mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri, berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Masyarakat mengaku aktif dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah melalui keikutsertaan mereka, khususnya mulai dari lingkup terkecil seperti dasa wisma, PKK, serta posyandu.

d. *Shared Understanding* (pemahaman bersama)

Penting bagi *stakeholder* mengembangkan pemahaman yang sama untuk bisa mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi ini terdapat pemahaman yang menyiratkan kesepakatan bersama di antara *stakeholder* terkait pentingnya melaksanakan kolaborasi untuk mewujudkan percepatan penurunan *stunting*. *Stakeholder* memahami dampak buruk *stunting* bagi kualitas hidup manusia dalam jangka pendek hingga jangka panjang yang apabila tidak diatasi maka akan menjadi

beban, tidak hanya bagi Kabupaten Wonogiri tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai untuk menyatukan *stakeholder* dalam kolaborasi diantaranya dikomando oleh Bapak Bupati Wonogiri, yaitu: “Go Nyawiji, Sesarengan Mbangun Wonogiri” artinya bersatu, bersama-sama membangun Wonogiri. Komando tersebut relevan, karena kolaborasi untuk mewujudkan percepatan penurunan *stunting* dapat mendukung kesuksesan pembangunan di Kabupaten Wonogiri, terutama dari segi pembangunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjadi modal penting untuk mensukseskan pembangunan-pembangunan lainnya.

Lebih lanjut, sejumlah upaya dilakukan untuk senantiasa menyatukan pemahaman terkait segala sesuatu dalam keberjalanan kolaborasi, diantaranya dilakukan melalui koordinasi dengan pertemuan langsung ataupun dengan memanfaatkan penggunaan teknologi *handphone* (HP). Koordinasi yang dilakukan menjadi sarana bagi *stakeholder* untuk senantiasa menyatukan pemahaman bahwa mereka masih dalam visi misi dan tujuan yang sama, yaitu berupaya mewujudkan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri. Dalam koordinasi dilakukan musyawarah untuk sarana menyatukan pemahaman. Apabila terdapat suatu masalah, *stakeholder* kemudian membangun pemahaman yang sama untuk mendefinisikan masalah yang ada dan selanjutnya dapat menyatukan pengetahuan untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya menyelaraskan pemahaman terkait keberjalanan kolaborasi juga dilakukan kepada masyarakat, diantaranya melalui publikasi informasi pada baliho, videotron, dan website.

Gambar 7. Penyampaian informasi penanggulangan *stunting* pada baliho dan videotron



Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Wonogiri (discan pribadi)

Upaya menyelaraskan pemahaman terkait keberjalanan kolaborasi dilakukan di tingkat kabupaten hingga desa, termasuk melalui *stakeholder* yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti halnya RT/RW, kader setempat, bidan desa, tim pendamping keluarga untuk mengena kepada masyarakat sehingga masyarakat mengaku tidak merasa kesulitan untuk memperoleh informasi dan berkoordinasi dalam proses kolaborasi.

e. *Intermediate outcomes* (pencapaian hasil)

Proses yang tidak kalah penting dari dilakukannya kolaborasi adalah mengetahui hasil yang sudah bisa dicapai untuk membangun momentum yang mengarahkan pada pencapaian tujuan akhir. Dari kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri, hasil yang dirasakan oleh *stakeholder* adalah meningkatnya jiwa gotong royong dan kerja sama dalam mengatasi suatu masalah publik. Selain itu, hasil yang dicapai adalah seluruh program dan kegiatan intervensi berjalan dengan baik, sehingga menjadikan masyarakat terintervensi baik secara spesifik maupun sensitif. Masyarakat yang terintervensi kemudian meningkat kesadaran dan pengetahuan mereka terkait penanggulangan *stunting*. Saat terindikasi *stunting*, masyarakat tidak lagi merasa terdiskriminasi dan mulai mau mendapat penanganan. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat diantaranya ditandai dengan meningkatnya perhatian dan keingintahuan masyarakat dalam dialog interaktif yang dilakukan oleh TP PKK melalui siaran radio giri swara Wonogiri terkait upaya penanggulangan *stunting* seperti halnya dalam hal pola hidup, pola asuh, dan pola konsumsi pangan untuk keluarga.

Sikap masyarakat yang mau bertindak memperbaiki pola hidup dengan adanya intervensi yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir mengantarkan pada pencapaian hasil sementara berupa penurunan angka *stunting* di Kabupaten Wonogiri yang dapat dianggap sebagai “*small wins*” atau kemenangan kecil yang dapat dipantau melalui pengukuran untuk e-PPGBM setiap bulannya. Rencana pemerintah untuk menindaklanjuti hasil tersebut adalah dengan melaksanakan aksi konvergensi secara konsisten dan tidak menutup kemungkinan menciptakan terobosan-terobosan baru untuk mengoptimalkan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri. Meski demikian disebutkan bahwa dalam proses kolaborasi ke depannya bukan tidak mungkin akan ada suatu tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah pemilu serentak tahun 2024 yang juga menjadi perhatian pemerintah dan dapat mengalihkan fokus masyarakat dari upaya mewujudkan percepatan penurunan *stunting*, sehingga hal itu menjadi suatu tantangan tersendiri.

Penutup

Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kolaborasi diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai mandat atau peraturan terkait percepatan penurunan *stunting*. TPPS dibentuk dengan melibatkan *stakeholder* dari pemerintah dan non pemerintah secara terorganisir.
- b. Dialog tatap muka telah dilakukan mulai dari tim kecil (OPD), tim besar (TPPS), hingga lebih luas dalam bentuk rembuk *stunting* yang dilakukan secara interaktif. Namun, sektor swasta atau badan usaha yang menjadi

bagian dalam TPPS di tingkat Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya menunjukkan keterlibatan aktif.

- c. Kepercayaan sudah terbangun sejak awal dengan didukung oleh pendekatan yang dilakukan Kepala Daerah dan jajarannya untuk merangkul *stakeholder*. *Stakeholder* juga sudah memiliki kesadaran bahwa percepatan penurunan *stunting* dapat diwujudkan dengan bekerja sama untuk “mengeroyok” faktor penyebab *stunting* sesuai tupoksi masing-masing. Upaya menjaga kepercayaan kemudian dilakukan melalui pertemuan dan komunikasi intens untuk mendorong keterbukaan.
- d. Komitmen dijabarkan melalui legalitas-formal, diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan *stunting* secara berkelanjutan. Dukungan sumber dana bantuan dari APBN maupun APBD, koordinasi antar*stakeholder*, dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan komitmen untuk mencapai percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri.
- e. Pemahaman yang sama terkait pentingnya mengupayakan percepatan penurunan *stunting* telah terbangun di antara *stakeholder* dan didorong dengan nilai-nilai “Go nyawiji, sesarengan mbangun Wonogiri”. Lebih lanjut, penyelarasan pemahaman terkait keberjalanan kolaborasi diupayakan dengan koordinasi dalam pertemuan langsung ataupun komunikasi melalui *handphone*, serta publikasi informasi kepada masyarakat.
- f. Hasil yang dicapai dari kolaborasi ini adalah meningkatnya jiwa gotong royong dan kerja sama dalam mengatasi masalah publik. Hasil lainnya adalah berbagai program dan kegiatan penanggulangan *stunting* berjalan dengan baik, sehingga menjadikan masyarakat terintervensi baik secara spesifik maupun sensitif, diikuti dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait penanggulangan *stunting* yang meningkat. Hal yang demikian telah mengantarkan pada tercapainya hasil sementara berupa penurunan angka *stunting* di Kabupaten Wonogiri berdasarkan e-PPGBM. Rencana pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk menindaklanjuti hasil tersebut, yaitu dengan melanjutkan program dan kegiatan yang sudah ada serta berupaya mengembangkan terobosan baru guna mengoptimalkan percepatan penurunan *stunting* dan sekaligus mencegah adanya kasus *stunting* baru.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Mengetahui bahwa kekurangan dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya keterlibatan aktif dari pihak swasta atau badan usaha yang notabene turut menjadi bagian dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Wonogiri, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri ke depannya dapat mendorong sektor swasta atau badan usaha tersebut untuk berperan aktif dalam mendukung

percepatan penurunan *stunting* melalui *corporate social responsibility* atau pengoptimalan lingkungan kerjanya. Meskipun tidak mudah, harus hati-hati dan membutuhkan proses yang lama karena rawan memicu konflik kepentingan, namun penting diupayakan karena mengingat bahwa sektor swasta atau badan usaha memiliki pekerja dan juga berada di lingkungan masyarakat yang dapat melahirkan generasi *stunting* apabila tidak diperhatikan lingkungan kerja dan kesejahteraannya.

2. Kemudian mengetahui bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Wonogiri dan masyarakat sejauh ini sudah berjalan dengan baik dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, maka pemerintah Kabupaten Wonogiri selanjutnya diharapkan dapat terus memastikan bahwa pihaknya dan masyarakat dapat dengan konsisten menempatkan percepatan penurunan *stunting* sebagai isu prioritas. Hal itu sekaligus penting untuk mencegah munculnya kasus *stunting* baru di kemudian hari.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arianita, V. B. J., Roosinda, F. W., & Ekantoro, J. (2021). Kampanye Digital pada Instagram @Perhumas_Indonesia melalui #IndonesiaBicaraBaik dalam Mewujudkan Masyarakat 5.0. *Journal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 113–122. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.4>.
- Bappenas & Unicef. (2019). Achieving the SDGs for Children in Indonesia: Emerging Findings for Reaching the Targets. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/achieving-sdgs-children-indonesia-emerging-findings-reaching-targets>. Diakses 12 Juli 2022.
- Chaterine, R. N. (2021). Mendagri: Prevalensi “Stunting” Tahun 2019 Capai 27,7 Persen. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/11344541/mendagri-prevalensi-stunting-tahun-2019-capai-277-persen?page=all>. Diakses 24 Juli 2022.
- Fitri, L. (2018). Hubungan BBLR dan ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting di Puskesmas Lima Puluh Pekanbaru. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 3(1), 131-137. <http://doi.org/10.22216/jen.v3i1.1767>.
- Jateng.tribunnews.com. (2022). 'Sesarengan Mbangun Wonogiri' Jadi Kunci Angka Stunting Rendah. <https://jateng.tribunnews.com/2022/04/03/sesarengan-mbangun-wonogiri-jadi-kunci-angka-stunting-rendah>. Diakses 25 Juli 2022.
- Kemenkes RI (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. <https://promkes.kemkes.go.id/materi-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2022>. Diakses 03 Juni 2023.
- Kemenkes RI. (2021). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat

- Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>. Diakses 25 Juli 2022.
- Kominfo.go.id. (2022). Targetkan Penurunan Stunting 14 Persen pada 2024, Wapres Minta Komitmen Jalankan Perpres 72/2021. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41726/targetkan-penurunan-stunting-14-persen-pada-2024-wapres-minta-komitmen-jalankan-perpres-722021/0/berita>. Diakses 29 Juli 2022.
- Krjogja.Com. (2022). Kasus Stunting di Wonogiri Ternyata Terendah Ketiga Se-Jateng. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/241819/kasus-stunting-di-wonogiri-ternyata-terendah-ketiga-se-jateng>. Diakses 03 Agustus 2022.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Stunting.go.id. (2020). Apa yang dimaksud dengan konvergensi?. <https://stunting.go.id/faq/apa-yang-dimaksud-dengan-konvergensi/>. Diakses 03 Juni 2023.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting dan Masalah Gizi Kabupaten Wonogiri. (2022). Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Masalah Gizi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri.
- Unicef., WHO., & World Bank Group. (2023). Levels and Trends in Child Malnutrition: Unicef/WHO/World Bank Group-Joint Child Malnutrition Estimates: Key Findings of The 2023 Edition. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073791>. Diakses 12 Agustus 2022.